

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

Setelah dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V, serta strategi dan arah kebijakan pada Bab VI, pada Bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Program – program tersebut merupakan langkah nyata yang akan dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto pada periode 2013-2018. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

Kebijakan pada **perspektif masyarakat/layanan** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

Kebijakan pada **perspektif proses internal** adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

Kebijakan pada **perspektif kelembagaan** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

Kebijakan pada **perspektif keuangan** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

#### **7.1.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 1**

Kebijakan Umum Pembangunan yang diarahkan dalam upaya Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal adalah mengembangkan Kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan Industri Rumah Tangga, penggunaan kearifan lokal untuk memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan

berdaya saing, Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto, Menyusun AMDAL bagi kawasan pengembangan UMKM, industri Rumah tangga serta pusat perdagangan. Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya, Memantapkan pengelolaan dan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal, Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, meningkatkan kerjasama antara daerah produsen dengan pasar-pasar yang menjadi target penjualan hasil produksi, Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan koperasi serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Membuka lapangan usaha seperti tambang batubara dan pembakaran kapur.

Kebijakan umum tersebut diaplikasikan kedalam program pembangunan secara hirarki mendukung pelaksanaan misi pertama ini. Program tersebut adalah dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 7.1**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 1 : MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN MENCIPTAKAN PELUANG USAHA MELALUI KEUNGGULAN PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>Misi 1: Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal</b>								
1	<b>Prioritas 1: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing</b>								
1	1 Berkembangnya kegiatan industri rumah tangga berbahan baku lokal	Peningkatan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga	1 Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri Rumah Tangga	Jumlah Sentra Industri Rumah Tangga (buah)	715	1.000	1 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Deperindagkopnaker

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Penggunaan Kearifan Lokal untuk memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing	PDRB Sektor Industri (Juta)	157.232	210.000	2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Deperindagkopnaker
			3 Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto	Daya Beli Masyarakat (Rupiah)	630.200	650.000	3 Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Industri	Deperindagkopnaker
			4 Menyusun AMDAL bagi kawasan pengembangan UMKM, industri rumah tangga serta pusat perdagangan						

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 Tersedianya Outlet dan Pemasaran Hasil industri rumah tangga berbahan baku lokal di kawasan Wisata	Penyediaan Outlet dan Penjualan Cenderamata berbahan baku lokal di kawasan strategis objek wisata	1 Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya  2 Memantapkan pengelolaan dan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal  3 Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan	Jumlah Objek Wisata yang mempunyai Outlet (Buah)	2	5	1 Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan  2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  3 Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan  Perdagangan  Perdagangan	Deperindagkopnaker  Deperindagkopnaker  Deperindagkopnaker

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 meningkatkan kerjasama antara daerah produsen dengan pasar-pasar yang menjadi target penjualan hasil produksi  5 Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya						
	3 Tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat yang baru	Peningkatan Kemitraan dan Bisnis bagi pelaku usaha baru dengan sumber pendanaan dalam permodalan	1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan koperasi serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya	Jumlah usaha masyarakat yang baru tercipta (dalam Waktu 2013-2018) (Buah)	0	50	1 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi  2 Peningkatan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Deperindagkopnaker  Setdako/Deperindagkopnaker

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Setdako/Deperindagkopnaker



### **7.1.2. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 2**

Kebijakan Umum Pembangunan yang diarahkan dalam upaya Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah adalah Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran, Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja, Mengembangkan jiwa interpreneur. Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain, Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase, Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata, Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api, Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial, Meningkatkan Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas, Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih, Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Meningkatkan pengelolaan SDA dan Lingkungan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat, Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup, Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang, Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota. Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah, Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air sembarangan, Meningkatkan penanganan lahan kritis dibeberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor, Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana. Meningkatkan Sumber Daya Petani tanaman Pangan dan Hortikultura, Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil,

Mengarahkan dan mendirikan pengolahan hasil pertanian di tingkat masyarakat menjadi industri pengolahan, Meningkatkan pembangunan saluran irigasi teknis, Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan. Perluasan basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diagendakan program pembangunan sebagai berikut :

**TABEL 7.2**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	<b>Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah</b>								
2	<b>Prioritas 2 : Pengembangan Instruktur Secara Adil dan Merata</b>								
	1 Meningkatnya Pendapatan dan kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan keterampilan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensinya	1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran	Pendapatan Perkapita (Juta)	25	38	1 Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Deperindagkopna ker (Baru)
	2 Tersedianya calon tenaga kerja yang siap pakai dan mempunyai daya saing		2 Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja	Menurunnya Jumlah Pengangguran (%)	6,07	3	2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Deperindagkopna ker (KUAPPAS)
			3 Mengupayakan penciptaan jiwa interpreneur bagi masyarakat				3 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,	Tenaga Kerja	Deperindagkopna ker (Baru Banget)
	1 Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur	1 Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain	Persentase Jalan dalam kondisi Baik (%)	66,15	80	1 Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	PU (KUA PPAS)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	menunjang kepariwisataan	perkotaan	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	100	100	2 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU (KUA PPAS)
			3 Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase	Cakupan Layanan Drainase (M2)	44.909	75.000	3 Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU (KUA PPAS)
			4 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata						
			5 Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api,				4 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Pekerjaan Umum	PU (KUA PPAS)
							5 Pengadaan Peralatan dan Suku Cadang	Pekerjaan Umum	PU (Baru)
							6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda (Baru)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab	
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			6 Percepatan pertumbuhan pembangunan perumahan dan perkantoran serta industri sesuai prospek pengembangan ekonomi ssecara proporsional	Persentase Perkantoran untuk Pemerintah dalam kondisi layak (%)	100	100	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial	Pekerjaan Umum	PU (Baru)	
			7 Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial				2 Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama	Perumahan	PU (Baru)	
							3 Pengembangan Perumahan	Perumahan	PU (KUA PPAS)	
							4 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	PU (baru)	
			8 Meningkatkan Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas				Persentase Masyarakat yang menggunakan air bersih (%)	85,25	92	1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9 Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih	Luas Sawah yang teraliri Irigasi Teknis (Ha)	509	790	2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perumahan	PU (KUA PPAS)
			10 Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU),						
	1 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan	Peningkatan pengawasan penegakan aturan terhadap aktivitas pertambangan masyarakat	1 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Persentase Perusahaan Mereklamasi akibat aktivitas tambang (%)	100	100	1 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumber daya mineral	Deperindagkopnaker (KUAPPAS)
			2 Meningkatkan pengelolaan SDA dan Lingkungan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat	Persentase Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Lingkungan (%)	100	100	2 Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan	Energi dan Sumber daya mineral	Deperindagkopnaker (Baru)
			3 Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	Kasus Illegal Logging, Illegal Mining dan Pembakaran Hutan (Kasus)	0	0	3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	BLH (KUAPPAS)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang	Terpenuhinya target RTH (%)	10,77	12	4 Pengendalian Pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	BLH (KUAPPAS)
			5 Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan				5 Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Lingkungan Hidup	BLH (KUAPPAS)
			6 Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota				6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	Perencanaan Pembangunan	PU (KUA PPAS)
			7 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya				7 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	PU (KUA PPAS)
			8 Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten				8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	PU dan Bappeda(KUA PPAS)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9 Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	PU (KUA PPAS)
							10 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan	Pertanahan	SETDAKO PEMERINTAHAN (KUAPPAS)
	2 Terwujudnya pengelolaan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam penanganan, dan pengelolaan limbah	1 Rintisan Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah	Desa/Kel yang ODF (%)	20	100	1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	BLH (KUAPPAS)
			2 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah (%)	80	100			
			3 Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah						



No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang untuk kebersihan lingkungan						
	3 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana	Peningkatan Sinergitas dan Peran Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	1 Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Swadaya Masyarakat Penanganan dan Siaga Bencana (Kelompok)	N/A	37	1 Tanggap darurat jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU (KUAPPAS)
			2 Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor				2 Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol dan PBD (KUAPPAS)
			3 Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana				3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	Badan Kesbangpol dan PBD (Baru)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana				4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol dan PBD (KUAPPAS)
			5 Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana						
			6 Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana						
			7 Pembentukan Tim Mitigasi Bencana tingkat masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai potensi bencana tinggi						
1	Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Hasil Pertanian	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Alam dan Sumber Daya	1 Meningkatkan Sumber Daya Petani tanaman Pangan dan Hortikultura	Produktifitas Padi (Ton/Ha)	4,94	5,1	1 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Dinkessos, Perdagangan (Baru-Perbaikan)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tanaman pangan	Pengelola Pertanian Tanaman Pangan	2 Meningkatkan penggunaan pupuk bersubsidi pada masyarakat	Jumlah Hasil Pertanian dengan kualitas Standar Nasional (Buah/Macam)	0	2	2 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Pertanian (Baru-Perbaikan)
			3 Meningkatkan pembangunan saluran irigasi teknis	Nilai PDRB Pertanian Tanaman Pangan (Juta)	76.635	100.000			
	2 Terwujudnya Pola Konsumsi Sehat bagi Masyarakat dengan pangan lokal	Memasyarakatkan Olahan Pangan Selain Beras		Nilai/Scor Pola Pangan Harapan	84,1	88	1 Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Pertanian, Setdako (KUA PPAS)
	1 Meningkatnya kualitas, Produktivitas dan pengelolaan hasil Perkebunan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Pengelola Perkebunan	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Kakao (biji Kering) (Ton/Ha)	0,7	0,8	1 Peningkatan dan Pengembangan tanaman Perkebunan	Pertanian	Pertanian (KUA PPAS)
			2 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola hasil pertanian	Meningkatnya Produktifitas Karet (Bokar) (Ton/Ha)	0,7	0,9	2 Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Setdako/Pertanian (Baru-Perbaikan)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Merintis perwujudan kawasan agrowisata sawahlunto	Adanya industri pengolahan kakao (unit)	N/A	3	3 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pertanian	Pertanian (Baru - Perbaikan)
			4 Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil	Nilai PDRB Subsektor Perkebunan (Juta)	8.057,46	10.000	4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Pertanian (KUA PPAS)
							5 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Pertanian (KUA PPAS)
	2 Meningkatkan Kualitas Hasil Peternakan		1 Mengarahkan dan mendirikan pengolahan hasil pertanian di tingkat masyarakat menjadi industri pengolahan	Populasi Sapi Potong (ekor)	6425	7005	1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan	Pertanian	Pertanian (KUA PPAS)
				Nilai PDRB Sektor Peternakan (Juta)	63.969	120.000	2 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Pertanian (KUA PPAS)
							3 Pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Pertanian (KUA PPAS)
							4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Pertanian (KUA PPAS)

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Meningkatnya Besaran Pendapatan Asli daerah	Perluasan basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial	1 Perluasan basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial	Besaran PAD (Milyar)	39	50	1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD (KUAPPAS)
							2 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD (KUAPPAS)

### **7.1.3. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MISI 3**

Kebijakan Umum Pembangunan dalam upaya Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter adalah Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat, Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME, Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam beribadah, Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, Mewujudkan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar. Merintiskan Wajar 12 Tahun yang berkualitas, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Meningkatkan harkat, martabat, dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diagendakan program pembangunan sebagai berikut :

**TABEL 7.3**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 3 : MEMUPUK KEHIDUPAN SOSIAL YANG AGAMAI DAN BERAKHLAK MULIA SERTA MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<b>Misi 3: Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia Serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter</b>								
3	<b>Prioritas 3: Peningkatan kualitas kesalehan sosial melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti</b>								
4	<b>Prioritas 4 : Menjalin Kehidupan Sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.</b>								
	1 Meningkatnya pengamalan ajaran agama pada generasi muda	Mempertahankan Jumlah Pelajaran Agama Sebanyak 6 Jam seminggu	1 Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat	Persentase Siswa Tamat SD yang bisa baca Al - Quran (%)	100	100	1 Pembinaan Agama dan adat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO KESRA, 4 Kecamatan
			2 Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME	Jumlah TPA/TPSA yang Aktif (Buah)	172	172			
			3 Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam beribadah	(Kasus)	0	0			

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah	Siswa SMP yang lancar baca Al-Qur'an (%)	N/A	100			
5	<b>Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter</b>								
	1 Meningkatnya Mutu pendidikan	Pemantapan Pelaksanaan Fullday	1 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Tamatan SLTA yang diterima di PTN (%)		70	1 Peningkatan Mutu Pendidikan SDN/MI/SDLB	Pendidikan	Diknas
			2 Mewujudkan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar	Persentase kelulusan UN (%)	100	100	2 Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa	Pendidikan	Diknas
	2 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Pemerataan akses dan pelayanan pendidikan	1 Merintiskan Wajar 12 Tahun yang berkualitas	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	99,5	99,9	1 Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Diknas
			2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai	Nilai APM SD (%)	95,69	98	2 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Diknas



No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan	Nilai APM SMP (%)	65,8	75	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan Menengah	Pendidikan	Diknas
			4 Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin	Nilai APM SMA (%)	73,67	80	4 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
				Angka RLS (Tahun)	9,42	10,2	5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Pendidikan	Diknas
							6 Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Diknas
							7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah	Pendidikan	Diknas
							8 Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan	Diknas

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Teraplikasikannya kurikulum pendidikan berkarakter di tiap jenjang pendidikan	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik/guru dan tenaga kependidikan	1 Meningkatkan harkat, martabat, dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya	Persentase Sekolah yang mengaplikasikan Kurikulum berkarakter (%)	0	100	1 Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Diknas
	2 Meningkatnya kualitas sikap dan moral anak-anak atau generasi muda di Kota Sawahlunto	Integrasi ilmu nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia dalam setiap mata pelajaran		Kasus kenakalan remaja, amoral dan asusila pada generasi muda berkurang (Kasus)	N/A	0	1 Pendidikan Berkarakter	Pendidikan	Diknas

#### **7.1.4. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MISI 4**

Kebijakan Umum Pembangunan dalam upaya Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya adalah Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat, Membangun Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional, Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu, Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif. Mewujudkan penguatan Kelembagaan Linmas yang Lebih Profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Penyelesaian kasus secara preventif, represif dan persuasif, Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga, Meningkatkan Kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Kesehatan, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan, obat dan perbekalan kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan, Meningkatkan Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, Mengoptimalkan Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi KB terhadap pasangan menikah, Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan, peran perempuan dan kesetaraan gender, Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan. Mendukung Pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan Kelurahan, Mendorong pembentukan kelompok pemuda produktif yang dapat berdampak pada pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, Penguatan Organisasi Kepemudaan

dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diagendakan program sebagai berikut :

TABEL 7.4

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

UNTUK MISI 4 : MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG BERINTELEKTUALITAS, SEHAT DAN SEJAHTERA YANG MENGUASAI BERBAGAI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI DAN BUDAYA

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Misi 4: Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya								
6	Prioritas 6: Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM								
	1 Terwujudnya Kedewasaan Berpolitik ditengah masyarakat.	Sosialisasi dan Pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan demokrasi	1 Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (%)	74,51	80	1 Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol dan PBD
			2 Membangun Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional				2 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
			3 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu						

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan ditengah Masyarakat	Sosialisasi dan Pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan demokrasi	1 Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	Jumlah Unjuk Rasa, kerusuhan dan/atau perkelahian antar etnis (Kasus)	2	0	1 Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			2 Mewujudkan penguatan Kelembagaan Linmas yang Lebih Profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.	Jumlah/persen tase rumah yang memasang bendera pada hari Besar Nasional (%)	N/A	75	2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol dan PBD, Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD, Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD, Setdako
	1 Menurunnya tindak kekerasan pada IRT dan Anak	Penyelesaian kasus secara preventif, represif dan persuasif	1 Penyelesaian kasus secara preventif, represif dan persuasif	Jumlah Kasus KDRT (Kasus)	5	0	1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PMPKB

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga				2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Setdako
	1 Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Cyber City		1 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah	Persentase Fasilitas Aparatur Sosial dengan fasilitas internet (%)	N/A	100	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	Komunikasi dan Informatika	Diknas, Setwan, DPPKAD, SETDAKO HUMAS, Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Desa/Kel yang terfasilitasi Internet (Desa/Kel)	N/A	37	2 Peningkatan Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah	Komunikasi dan Informatika	DPPKAD, SETDAKO HUMAS, Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
							3 Kerjasama informasi dengan Mass Media	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Sekretariat DPRD
7	Prioritas 7 : Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan								

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Tersedianya Pelayanan Kesehatan dan Sosial yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur kesehatan	1 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Persentase kepemilikan asuransi kesehatan (%)	93,46	100	1 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD, Dinkessos
		Sosialisasi tentang asuransi kesehatan subsidi Pemerintah Daerah	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dirumah sakit dan tingkat dasar (sesuai Kajian)	N/A	Puas	2 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD
			3 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia dibidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar (%)	N/A	100	3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD
			4 Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas				4 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD, Dinkessos



No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 Meningkatkan Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat				5 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkessos
							6 Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkessos, BLH, PU, Pertanian, PMPKB
							7 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	Dinkessos
							8 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sosial	Dinkessos
							9 Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinkessos
	2 Meningkatnya Kesadaran, dan kemampuan hidup sehat masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	1 Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat	Meningkatnya Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,08	73	1 Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kesehatan	Dinkessos

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan	2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Managemen Kesehatan	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (orang)	2	0	2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkessos, Disdikpora
			3 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan, obat dan perbekalan kesehatan	Menurunnya Jumlah kematian bayi (orang)	14	5	3 Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkessos, KPMPKB
			4 Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan	Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi (Gizi Kurang dan gizi Buruk)pada anak balita (%)		14	4 Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkessos
				Persentase Rumah Tangga Ber PHBS (%)	60	75	5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Kesehatan	Dinkessos
				Persentase Rumah Tangga Ber Sanitasi Baik (%)	70	85	6 Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkessos
							7 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinkessos, PMPKB

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8 Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinkessos
							9 Peningkatan Kualitas Air	Kesehatan	Dinkessos
							10 Program Lingkungan sehat Perumahan	Perumahan	PU
		Peningkatan Pelayanan KB	5 Mengoptimalkan Sosialisasi penggunaan KB terhadap pasangan menikah	Meningkatnya rasio akseptor KB (%)	72,53	75	11 Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor PMPKB
							12 Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor PMPKB
							13 Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor PMPKB
							14 Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor PMPKB
8	Prioritas 8 : Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan								

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Efektifitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Sawahlunto	1 Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,17	1,75	1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinkessos
							2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos
							3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
							4 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkessos
9	Prioritas 9 : Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan disemua bidang dan terjaminnya kesetaraan Gender								
	1 Diberdayakannya pemuda, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kualitas SDM dan Kapasitas lembaga/kelompok masyarakat serta penyetaraan gender	1 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa/Kel yang mempunyai Kelompok masyarakat, perempuan, ormas, dan karang taruna	N/A	37	1 Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Pemuda dan olah raga	Diknas, SETDAKO TAPEM

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	yang aktif (Desa/Kelurahan)			2 Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			3 Meningkatkan Kualitas Kehidupan, peran perempuan dan kesetaraan gender				3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Sekretariat DPRD
			4 Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan				4 Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kantor PMPKB
							5 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Setdako dan PMPKB
							6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Setdako dan PMPKB
10	Prioritas 10: Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan								

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Terciptanya budaya berolahraga difengah masyarakat	Meningkatkan Pemahaman terhadap budaya olahraga, budaya sehat dan sportivitas serta prestasi olahraga	1 Mendukung Pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan Kelurahan 2 Mendorong pembentukan kelompok pemuda produktif yang dapat berdampak pada pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan 3 Penguatan Organisasi Kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan	Cabang Olah Raga yang berkembang di Masyarakat (Cabang)	N/A	10	1 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Diknas

#### **7.1.5. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MISI 5**

Kebijakan Umum Pembangunan dalam upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien adalah Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani, Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan Pemerintahan. Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal, Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar, Menyempurnakan data administrasi kependudukan. Penguatan kelembagaan Arsip, Mencari terobosan dan objek wisata baru yang bernilai jual tinggi dan terfokus. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diagendakan program sebagai berikut :

**TABEL 7.5**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 5 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, MELAYANI, KREATIF, INOVATIF DAN EFISIEN**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V</b>	<b>Misi 5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Melayani, Kreatif, Inovatif Dan Efisien</b>								
<b>11</b>	<b>Prioritas 11: Perbaikan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik bersih dan melayani</b>								
	1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan Daerah	Pemantapan system birokrasi yang berkeadilan, dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	1 Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Opini BPK	WDP	WTP	1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Inspektorat, SETDAKO PEMERINTAHAN
			2 Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Aturan Perencanaan (%)	75	90	2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengaawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Inspektorat



No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	Tingkat Transparansi Pembangunan (Mulai Perencanaan sampai pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat) (%)	100	100	3 Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Setdako Tapem, Bappeda, Dinkessos, RSUD, SETDAKO HUKUM
			4 Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan Pemerintahan				4 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO PEMERINTAHAN
							5 Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO PEMERINTAHAN
							6 Operasional Kecamatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	4 Kecamatan
							7 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
							9 Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
							10 Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Semua SKPD
							11 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik	Bappeda
							12 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO PEMBANGUNAN
	1 Terpuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap SKPD	Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana	1 Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien	Jumlah SKPD yang memenuhi SPM dan SOP (%)	100	100	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	KKD dan semua SKPD
			2 Menerapkan sistem dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai				2 Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	KKD

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya				3 Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO BAG HUKUM
							4 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	SETDAKO BAG HUKUM, Korpri
	2 Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik	Optimalisasi SIAK Online	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal 2 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 3 Menyempurnakan data administrasi kependudukan	Persentase Penduduk dengan KTP elektronik (%)		100	1 Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan
	3 Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan yang profesional	Meningkatkan SDM pengelola Arsip	1 Penguatan kelembagaan Arsip	Pengelolaan arsip secara elektronik (sistem)	N/A	1	1 Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Kartor Pengelolaan arsip dan Pustaka

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Kartor Pengelolaan arsip dan Pustaka
							3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kearsipan	Kartor Pengelolaan arsip dan Pustaka
	1 Ditemukannya konsep dan terobosan yang baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	Menggaet Swasta untuk berinvestasi	1 Mencari terobosan dan objek wisata baru yang bernilai jual tinggi dan terfokus	Objek Wisata Baru (Buah)	0	10	1 Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

#### **7.1.6. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK MISI 6**

Kebijakan Umum Pembangunan dalam upaya Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah adalah Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang ramah, Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan, Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran, Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya, Menjadikan Bangunan Yang mencerminkan keberagaman budaya sebagai salah satu daya tarik Wisata, Meningkatkan Profesionalisme manajemen pengelolaan dan pemeliharaan makam syech, Penguatan kelembagaan pengelola benda dan bangunan cagar budaya, Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya, Mewujudkan pencapaian terdaftar sebagai kota warisan dunia versi UNESCO. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diaplikasikan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut :

**TABEL 7.6**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 6 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	<b>Misi 6: Mengoptimalkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Daerah</b>								
12	<b>Prioritas 12 : Pengembangan Sektor Kepariwisata</b>								
	1 Terwujudnya pengelolaan potensi tambang yang ramah lingkungan	Peningkatan manajemen pengelolaan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat serta ramah lingkungan	1 Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang ramah	Produksi Batu Bara (ton)	270.000	2,5 Juta (Akumulatif)	1 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya mineral	Deperindagkop naker
	2 Berkembangnya kegiatan Pariwisata Kota Sawahlunto	Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya potensi wisata yang ada dan inovasi objek wisata	1 Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Sawahlunto (orang)	730.000	1,5 Juta	1 Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Diknas

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Sawahlunto (Malam)	n/a	1	2 Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			3 Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya				3 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			4 Menjadikan Bangunan Yang mencerminkan keberagaman budaya sebagai salah satu daya tarik Wisata				4 Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
			5 Meningkatkan Profesionalisme manajemen pengelolaan dan pemeliharaan makam syech				5 Pengelolaan Permuseuman	Kebudayaan	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
			6 Penguatan kelembagaan pengelola benda dan bangunan cagar budaya				6 Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Kebudayaan	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya				7 Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya	Kebudayaan	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
			8 Mewujudkan pencapaian terdaftar sebagai kota warisan dunia versi UNESCO						



#### **7.1.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 7**

Kebijakan Umum Pembangunan dalam upaya Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional adalah Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka, Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum, Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb), Meningkatkan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto, Meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor, Meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi, Meningkatkan iklim investasi yang menarik dan mudah bagi investor, Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial untuk berkembang serta Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diaplikasikan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut :

**TABEL 7.7**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**UNTUK MISI 7 : MEMPERLUAS JARINGAN SOSIAL DAN EKONOMI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	<b>Misi 7: Memperluas Jaringan Sosial Dan Ekonomi Secara Nasional Dan Internasional</b>								
13	<b>Prioritas 13: Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Mengelola dan Memanfaatkan Potensi daerah</b>								
	1 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kab/Kota Lain di Sumatera Barat dalam rangka mengoptimalkan dampak MP3EI pada Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	1 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	Nota Kerjasama dengan Kabupaten/Kota atau Lembaga Penelitian (Unit)	2	5	1 Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2 Kerjasama Pembangunan	Pariwisata Perencanaan Pembangunan	Dinas Pariwisata Bappeda, Setdako Hukum
14	<b>Prioritas 14: Memperluas Jaringan Sosial , Ekonomi Secara Nasional dan Internasional</b>								
	2 Meningkatnya Aksesibilitas dalam daerah dan dengan Daerah Tetangga	Pembangunan Jalur alternatif Baru ke dalam kota Sawahlunto dari daerah tetangga	1 Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi	Ruas Jalan yang menghubungkan dengan kabupaten/kota tetangga berstatus mantap (Ruas Jalan)	4	8	1 Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			antara pariwisata dan umum	Jalan Sentra Produksi dan Jalan Lingkungan yang terbangun (Km)	0	100 (Akumulatif)	2 Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Perhubungan	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
			2 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)				3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
							4 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
							5 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
							6 Pengelolaan Penerangan Jalan umum	Pekerjaan Umum	PU

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Meningkatnya Kerjasama dengan investor	Memberikan kemudahan investasi dan Mendorong kesinambungannya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara sector pertanian, agribisnis, wisata dan sector pertambangan	1 Meningkatkan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto	Nilai PMDN (Milyar(Akumulatif)) Nilai PMA (Rupiah)	N/A	500	1 Pembinaan dan Pelayanan Perizinan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
			2 Meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor				2 Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
			3 Meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya daan memudahkan proses investasi				3 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
			4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi						

No	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Capaian Kinerja		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 Meningkatkan iklim investasi yang menarik dan mudah bagi investor  6 Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial untuk berkembang  7 Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur						

## **7.2. KEBIJAKAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN**

### **7.2.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA**

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota; dan
- c. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air.

### **7.2.2. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KOTA**

#### **7.2.2.1. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung**

- a. Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung.

#### **7.2.2.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya**

- a. Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor atau subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri serta perdagangan dan jasa;
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota;
- d. Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni;
- e. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;

- f. Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota;
- g. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

#### **7.2.3. KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS KOTA**

- a. Pengembangan kawasan perdagangan regional dan terminal terpadu dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW;
- b. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya;
- c. Pengembangan pusat pemerintahan kota baru dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di bagian Utara; dan
- d. Pengembangan kawasan wisata dalam rangka rehabilitasi kawasan bekas tambang, pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota.

#### **7.2.4. STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG**

Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang daerah sebagai kota wisata dan PKW meliputi:

- a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan wisata berskala regional;
- b. Mengembangkan prasarana rumahsakit dan terminal yang sesuai dengan kriteria PKW;
- c. Mengembangkan pasar regional atau terminal agrobisnis;
- d. Meningkatkan akses jalan keluar-masuk ke kabupaten atau kota sekitar; dan
- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap

Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota meliputi:

- a. Menetapkan pusat kota baru untuk masa mendatang;
- b. Menetapkan subpusat kota di setiap ibukota kecamatan
- c. Menetapkan pusat lingkungan di setiap pusat kelurahan atau desa; dan
- d. Mengembangkan subpusat kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan kecamatan.

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Jaringan Energi, Jaringan Telekomunikasi, Infrastruktur Perkotaan, dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Mengembangkan jaringan kolektor primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal;
- b. Mengembangkan terminal yang terintegrasi dan berhirarkhi;
- c. Mengembangkan dan pemanfaatan jalur kereta api untuk pelayanan angkutan barang, orang dan wisata berbasis kereta api;
- d. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana;
- e. Menyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana parkir;
- f. Melayani pengolahan limbah rumah tangga di kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah dan sedang dengan sistem setempat dan kawasan kepadatan tinggi dengan sistem terpusat;
- g. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA dengan metode *reduce, reuse, dan recycle*;
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
- i. Mengefektifkan pemanfaatan dan meningkatkan sistem pengolahan TPA dengan metoda *sanitary landfill*.

#### **7.2.5. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG**

Strategi pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan meliputi:

- a. Menetapkan batas-batas kawasan lindung;



- b. Melestarikan hutan, taman kota, sempadan sungai, dan sekitar mata air;
- c. Melakukan konservasi di daerah rawan bencana longsor di 4 (empat) kecamatan dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya rehabilitasi;
- d. Mengelola hutan lindung, sempadan sungai, sekitar mata air, dan taman kota; dan
- e. Mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi lahan.

Strategi pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung dan wisata kota meliputi :

- a. Membangun kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk garis sempadan sungai dan jalur rel kereta api; dan
- b. Membuat RTH kota meliputi Hutan Kota, jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Lingkungan, Kawasan Sabuk Hijau (*Green Belt*) dan lain-lain, untuk memenuhi proporsi RTH 30 (Tiga Puluh) persen dari luas kota.

#### **7.2.6. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA**

Strategi pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor atau subsektor unggulan yaitu Pertambangan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Industri serta Perdagangan dan Jasa meliputi:

- a. Mengembangkan sektor pertambangan dengan menetapkan kawasan pertambangan yang memperhatikan kelayakan berdasarkan daya dukung lingkungan dan merehabilitasi kawasan lahan bekas tambang untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan RTH;
- b. Mengembangkan sektor industri dengan mengembangkan kawasan sentra industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam di setiap subpusat kota dan mengembangkan pusat pemasaran produksi industri kecil berupa tenun, kerajinan, cinderamata, dan makanan di pusat kegiatan wisata;
- c. Mengembangkan sektor pariwisata dengan mengembangkan Obyek Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Tempat Rekreasi, dan Agrowisata;

- d. Mengembangkan sektor perdagangan dengan memantapkan fungsi pasar yang telah ada dan menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan pasar;
- e. Mengembangkan sektor kehutanan dan perkebunan dengan mengembangkan perkebunan rakyat berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata; dan
- f. Merehabilitasi dan mengelola hutan produksi dengan penanaman tanaman yang memiliki ekonomi tinggi, memiliki kemampuan meresapkan air, dan mencegah bencana longsor.

Strategi pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota meliputi mempertahankan fungsi, menata, mengendalikan alih fungsi kegiatan hutan produksi, pertanian dan perkebunan sebagai kawasan resapan air dan RTH kota

#### **7.2.7. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI**

- a. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan;
- b. Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan;
- c. Menyediakan lahan untuk rumah susun; dan
- d. Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas.

#### **7.2.8. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

- a. Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto;
- b. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap; dan
- c. Membangun prasarana dan sarana perkantoran.

**7.2.9. STRATEGI PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG MEMADAI SESUAI DENGAN TINGKAT PERKEMBANGAN KOTA**

- a. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kotamelalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada pemerintah kota untuk dijadikan areal pelayanan umum; dan
- b. Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap subpusat kota dan di pusat lingkungan.

**7.2.10. STRATEGI PERWUJUDAN DAN PENINGKATAN KETERPADUAN DAN KETERKAITAN ANTARKEGIATAN BUDI DAYA**

- a. Menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, termasuk ruang didalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan kota; dan
- b. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan Sumber Daya Manusia, Lingkungan, Aspek Politik, Pertahanan dan Keamanan Negara, Sosial Budaya serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**7.2.11. STRATEGI PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan kemanan negara;
- b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan kemanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ TNI

#### **7.2.12. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**

Strategi pengembangan kawasan perdagangan regional dan terminal terpadu di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan ekonomi regional terpadu; dan
- b. Mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang yang terpadu dengan pengembangan stasiun kereta api.

Strategi perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya meliputi:

- a. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya;
- b. Mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya;
- c. Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
- d. Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.

Strategi pengembangan pusat pemerintahan Kota di Kolok Kecamatan Barangin dan Sijantang Kecamatan Talawi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di bagian Utara meliputi:

- a. Mengalokasikan lahan untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan pendukungnya;
- b. Membangun kawasan pusat pemerintahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial ekonomi masyarakat kota;
- c. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat pemerintahan dan sekitarnya untuk menarik perkembangan kegiatan kota ke kawasan pemerintahan.

Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata di Kandih dalam rangka penataan dan rehabilitasi kawasan bekas tambang, pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kotameliputi:

- a. Melakukan rehabilitasi kawasan bekas tambang;

- b. Melakukan konservasi terhadap genangan-genangan bekas penambangan;
- c. Mendorong pembangunan hutan kota dan taman buah; dan
- d. Mendorong pembangunan kawasan wisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota.

#### **7.2.13. RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN**

Dalam menentukan pusat-pusat pelayanan terdapat beberapa elemen atau kriteria penetapan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Dukungan fasilitas
- b. Lokasi dan Aksesibilitas
- c. Keseimbangan Wilayah
- d. Kedudukan Wilayah

Sedangkan unsur-unsur utama yang dijadikan dasar penentuan pusat struktur pelayanan kota, meliputi: pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

- a. *Pusat Pelayanan Kota (PPK)* terdiri atas:
  - 1. Kawasan Pariwisata diutamakan di Kandih dan Kota Lama;
  - 2. Kawasan Perdagangan dan Jasa Regional di Muara Kalaban; dan
  - 3. Kawasan Pusat Pemerintahan dikembangkan di Kolok dan Sijantang.

- b. *Subpusat Pelayanan Kota (SPK)*

Sub Pusat Pelayanan Kota ditetapkan di setiap ibukota kecamatan mempunyai fungsi sebagai pelayanan pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, pasar, tempat ibadah skala kecamatan, pengembangan sub-terminal, pusat kegiatan dan pengembangan agrobisnis, wisata dan pelayanan penunjang lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota dan tingkat kecamatan.

- c. *Pusat Lingkungan (PL).*

Sistem pusat lingkungan yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan, meliputi pusat pemerintahan kelurahan dan desa.

Rencana pengembangan Kota Sawahlunto dilakukan dengan membagi Kota Sawahlunto menjadi 4 (empat) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Lebih jelasnya pembagian Sub pusat kota adalah sebagai berikut :

- a) **Sub Pusat Pelayanan Kota -A** terdiri dari Kecamatan Silungkang
- b) **Sub Pusat Pelayanan Kota -B** terdiri dari Kecamatan Lembah Segar
- c) **Sub Pusat Pelayanan Kota -C** terdiri dari Kecamatan Barangin
- d) **Sub Pusat Pelayanan Kota -D** terdiri dari Kecamatan Talawi

**TABEL 7.8**  
**PUSAT PELAYANAN KOTA SUBPUSAT PELAYANAN KOTA DAN PUSAT LINGKUNGAN**

Pusat Kegiatan	Pusat Lingkungan		Fungsi Kegiatan Utama
Pusat Pelayanan Kota	1. Kawasan perdagangan dan jasa regional di Desa Muara Kalaban		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal regional dan terminal agribisnis</li> <li>Perdagangan dan jasa</li> </ul>
	2. Kawasan pariwisata di Kandih		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariwisata</li> </ul>
	3. Kawasan pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan</li> </ul>
	4. Kota Lama		<ul style="list-style-type: none"> <li>Heritage/cagar Budaya</li> <li>Wisata budaya</li> <li>Agrobisnis</li> </ul>
	a. Kel Pasar	g. Desa Lunto Barat	
	b. kel Kubang Sirakuk Utara	h. Desa Lunto Timur	
	c. Kel Kubang Sirakuk Selatan	i. Desa Pasar Kubang	
	d. Kel aumulyo	j. Desa Kubang Tengah	
	e. Kel Tanah Lapang	k. Desa Kubang Utara Sikabu	
	f. Kel Air Dingin		
Sub Pusat Kota Barangin  <b>Di Desa Santur, Kel Durian II</b>	1. Kel Saringan	7. Desa Balai Batu Sandaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariwisata</li> <li>Pusat Pemerintahan</li> <li>Agrobisnis</li> </ul>
	2. Kel Lubang Panjang	8. Desa Santur	
	3. Kel Durian I	9. Desa Kolok Mudik	
	4. Kel Durian II	10. Desa Kolok Nan Tuo	
	5. Desa Talago Gunung		
	6. Desa Lumindai		
Sub Pusat Kota Talawi  <b>Di Talawi Mudik</b>	1. Desa Sikalang	7. Desa Bukik Gadang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi/pembangkit listrik</li> <li>Pertambangan</li> <li>Pendidikan Tinggi</li> </ul>
	2. Desa Rantih	8. Desa Batu Tanjung	
	3. Desa Salak	9. Desa Kumbayau	
	4. Desa Sijantang Koto	10. Desa Data Mansiang	
	5. Desa Talawi Hilir	11. Desa Tumpuk Tengah	
	6. Desa Talawi Mudik		
Sub Pusat Kota Silungkang  <b>Di Desa Muara Kalaban</b>	a. Desa Muara Kalaban		<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrowisata</li> <li>Industri kecil dan kerajinan</li> </ul>
	b. Desa Silungkang Oso		
	c. Desa Silungkang Duo		
	d. Desa Silungkang Tigo		
	e. Desa Taratak Bancha		

Sumber: Hasil Analisis, 2010

### 7.3. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 7.3.1. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

**AGENDA 1 : PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI KERAKYATAN BERBASISKAN PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL**

**AGENDA 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**AGENDA 3 : PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI AGAMA SERTA APLIKASI PENDIDIKAN BERKARAKTER**

**AGENDA 4 : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**AGENDA 5 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

**AGENDA 6 : PENGEMBANGAN WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA DAN WISATA REKREASI**

**AGENDA 7 : MENJALIN KERJASAMA DAN JARINGAN SOCIAL, EKONOMI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.**

**TABEL 7.9**  
**AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
1	Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan berbasis pariwisata dan produk lokal	1 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing.
2	Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang berwawasan lingkungan	2 Pengembangan infrastruktur secara adil dan merata
3	Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter	Peningkatan Pemahaman dan pengamalan Nilai Agama serta aplikasi pendidikan berkarakter	3 Peningkatan kualitas kesalehan social melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti 4 Menjalin kehidupan social yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama. 5 Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
4	Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera	Peningkatan Kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat	6 Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
	yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya		7 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 8 Lanjutan sapu bersih Kemiskinan. 9 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan Gender. 10 Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan.
5	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien	Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan	11 Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani.
6	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah	Pengembangan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Wisata Rekreasi	12 Pengembangan sector kepariwisataan
7	Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional	Menjalin Kerjasama dan jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional.	13 Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. 14 Memperluas jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional.

### 7.3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### **PRIORITAS 1 : PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, MANDIRI DAN DAYA SAING.**

Prioritas pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing diarahkan pada (a) Pembangunan sector industry kecil dan kerajinan, dengan titik berat pada pengembangan produk unggulan, (b) Pembangunan sector perdagangan dengan meningkatkan peran perdagangan produk-produk local (c) Peningkatan peran wilayah pedesaan sebagai actor penggerak ekonomi daerah (d) Pembangunan Sektor Pertanian dengan melalui pencapaian keseimbangan antara *on-farm* dan *off-farm*

#### **PRIORITAS 2 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SECARA ADIL DAN MERATA**



Prioritas Pengembangan Infrastruktur secara adil dan merata diarahkan pada (a) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur perhubungan (b) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik (c) Pengembangan energy alternative berbasis pemanfaatan limbah, baik limbah ternak maupun manusia untuk keperluan rakyat miskin (d) Pembangunan Infrastruktur Olahraga, (e) Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), (f) Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api,

**PRIORITAS 3 : PENINGKATAN KUALITAS KESALEHAN SOCIAL MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDI PEKERTI**

Pembangunan kesalehan social diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama dan adat sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai Kota Sawahlunto yang religious, beradat dan berakhlak. Selama ini telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuka agama dan adat di Kota Sawahlunto untuk membangun harmoni social, hubungan internal, antar umat beragama dan antar suku yang aman, damai, dan saling menghargai. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat Kota Sawahlunto yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan social, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Pembangunan sumber daya manusia dengan pemahaman dan kualitas kesalehan sosisal yang semakin meningkat dapat dilakukan dalam beberapa cara dan pendekatan yaitu peningkatan pendidikan kualitas pendidikan agama dan pendidikan adat pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Selain itu melalui peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama. Upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga social keagamaan dan lembaga adat juga harus dilakukan.

**PRIORITAS 4 : MENJALIN KEHIDUPAN SOCIAL YANG HARMONIS DALAM KOMPOSISI MASYARAKAT YANG HETEROGEN DAN BERBEDA AGAMA.**

untuk mendorong terwujudnya kehidupan social yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan beda agama akan diarahkan programnya pada : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. (b) Mendorong aktifitas lembaga pendidikan untuk turut serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebangsaan serta penanaman nilai akhlaq mulia dalam upaya memupuk peserta didik dalam berinteraksi secara positif di lingkungan masyarakat yang beragam.

**PRIORITAS 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER**

Pendidikan tidak hanya sekedar penanaman nilai intelektualitas semata, tetapi juga penanaman nilai karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Pendidikan berkarakter dapat dipahami sebagai sifat dasar, kepribadian, perilaku/tingkah laku, dan kebiasaan yang berpola. Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, social, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun kepribadian. Langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan antara lain : (a) Mendorong kebiasaan dan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial dan religious. (b) Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. (c) Memupuk kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun social. (d) Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan. (e) Agar peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan pendidikan berkarakter yaitu dengan menggunakan strategi terintegrasi dalam mata

pelajaran lainnya. Nilai-nilai karakter dapat disampaikan melalui mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Jasmani dan Olahraga, IPS, Bahasa Indonesia dan Pengembangan Diri

**PRIORITAS 6 : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HOKUM DAN HAM.**

Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, maka cara-cara yang dapat ditempuh melalui : (a) Revitalisasi system keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba; (b) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan, terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan para tokoh masyarakat; (c) Meningkatkan kerja sama dengan institusi penanggung jawab keamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; (d) Pemberian teladan praktik penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungannya.

**PRIORITAS 7 : PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERLUNYA MENJAGA KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Prioritas Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan akan ditempuh dengan cara (a) Memberi bantuan subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat terutama untuk keluarga miskin, misalnya dengan pemberian *voucher* untuk berbagai jenis layanan kesehatan yang berlaku sebagai “alat pembayaran “ di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik rumah sakit umum, puskesmas maupun pos-pos kesehatan. (b) Pengembangan prasarana dan sarana kesehatan pada wilayah-wilayah yang memang belum tersedia atau minim. (c) Melakukan perbaikan-perbaikan kesehatan lingkungan, seperti sanitasi, MCK, perbaikan lingkungan perumahan bagi keluarga miskin, system pembuangan air kotor,

dan nutrisi akan dilakukan sejalan dengan kebutuhan. (d) mengutamakan kualitas pelayanan yang ditandai dengan keramahan, kepatutan dan tanpa membedakan layanan status social.

#### **PRIORITAS 8 : LANJUTAN SAPU BERSIH KEMISKINAN.**

Secara spesifik kebijakan penanganan kemiskinan diarahkan pada : (a) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang merintangi aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; (b) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; (c) Penajaman program pembangunan lintas sector dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; (d) Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; (e) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara gratis melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan program-program lain yang berkelanjutan; (f) Peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan dasar secara gratis dan bermutu; (g) Peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat miskin terhadap rumah murah, sanitasi dan lingkungan yang sehat serta ketercukupan fasilitas air bersih; (h) Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada; (i) Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal; (j) Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi pedesaan baik pada sekitar hutan, persawahan, dan pertambakan dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif; (k) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan; (l) Pengintegrasian semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan kemiskinan; (m) pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan perguruan tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program; (n) Peningkatan

keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang kondusif.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat. Sasaran lanjutan program sapu bersih kemiskinan ini adalah (a) Menurunnya presentasi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan; (b) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; (c) Terpenuhinya pelayanan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin secara gratis dan bermutu; (d) Terpenuhinya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan merata; (e) Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; (f) Terbukannya kesempatan kerja dan berusaha; (g) Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha; (h) Terbangunnya pusat pengembangan cluster ekonomi kawasan pedesaan dan pembelajaran masyarakat miskin dalam pengembangan potensi ekonomi pedesaan; (i) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif; (j) Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaga kualitas lingkungan hidup; (k) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; (l) Terjaminnya integrasi program sektoral yang secara tegas berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

**PRIORITAS 9 : PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN DI SEMUA BIDANG DAN TERJAMINNYA KESETARAAN GENDER.**

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender dilaksanakan melalui : (a) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan public, (b) Meningkatkan taraf kehidupan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan, (c)

Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

**PRIORITAS 10 : PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN.**

Salah satu factor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi factor utama. Namun demikian, selain kedua factor tersebut, factor lain yang juga cukup berpengaruh adalah pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Dalam konteks yang seperti ini, pembinaan olahraga sepak bola di Kota Sawahlunto menjadi prioritas pembinaannya, karena olah raga sepak bola saat ini, kenyataannya sudah menjadi alat marketing komunikasi yang efektif untuk membangun citra Kota Sawahlunto di mata komunitas nasional. Di samping sepak bola, cabang-cabang olah raga yang lain perlu mendapat perhatian serius karena juga memberi kontribusi yang besar kepada dunia olahraga di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini maka revitalisasi fungsi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto menjadi strategis dan harus dilakukan. Disamping itu, akan dilaksanakan program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan (LK), sebagai salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah social lainnya dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan pemuda.

**PRIORITAS 11 : PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI.**

Prioritas Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani. Diarahkan pada (a) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan daerah serta tata organisasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan secara mandiri. (b) Mewujudkan kemitraan pembangunan, dengan merajut jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi dan dengan Provinsi lainnya;

antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, swasta / pengusaha/pebisnis, dan LSM dalam lingkup wilayah Kota Sawahlunto secara luas dalam upaya menumbuhkan perekonomian, pemerataan kutub-kutub ekonomi wilayah dan pertumbuhan wilayah secara umum. (c) Meningkatkan kemandirian keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (d) Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat pula. (e) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (f) Mewujudkan stabilitas kehidupan social politik dan social budaya yang dinamis dalam mendorong partisipasi aktif/peran serta masyarakat kedalam kehidupan demokrasi. (g) Merealisasikan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal dalam pembangunan sebagai akses responsive terhadap masyarakat melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. (h) melakukan reformasi birokrasi, memantapkan paradigma aparatur sebagai pelayanan masyarakat bukan dilayani, terutama pada pusat pelayan umum, (i) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain pemantapan system informasi keuangan daerah, pengembangan *one stop service*, pengembangan bursa tenaga kerja *on line*, penerapan *mekanisme complain*. (j) Penggunaan *e-government*, *e-Procurement*, *e-devolepment*. (k) Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi aparatur.

## **PRIORITAS 12 : PENGEMBANGAN SECTOR KEPARIWISATAAN**

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan objek wisata yang telah ada (Waterboom dan Kandih), Pemerintah Daerah telah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ke tiga (PT. WWS). Disamping mengelola dan mengembangkan objek wisata yang sudah ada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu merencanakan terobosan baru dan inovasi objek wisata yang lebih diminati oleh wisatawan. Dalam upaya menarik minat wisatawan, pengembangan tempat-tempat tujuan wisata akan dilakukan melalui penataan ruang dan penyediaan fasilitas umum yang memadai dengan penekanan pada lingkungan disekitar tempat-tempat tujuan wisata tersebut, sehingga dapat menjadi pusat promosi dan penjualan produk-produk unggulan Kota Sawahlunto.

**PRIORITAS 13 : PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH.**

Prioritas Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah diarahkan pada (a) Melakukan perbaikan-perbaikan dengan memberikan kemudahan prosedur dan mekanisme perijinan, perpajakan, keamanan, pelayanan birokrasi dan penyediaan infrastruktur yang memungkinkan. (b) Memberikan perlindungan hukum atas usaha yang dilaksanakan oleh investor sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan tenang, aman dan nyaman serta menghindari terjadinya konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar. (c) Menciptakan daya saing masyarakat /investor local agar tidak termarginalkan oleh investor dari luar daerah. (d) Memberikan kemudahan investasi bagisektor riil dan pertambangan melalui kebijakan usaha dan perbaikan infrastruktur guna mendorong kesinambungan dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara sector pertanian, agribisnis, wisata dan sector pertambangan. (e) Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur, (f) Mengarahkan kebijakan investasi pada pengembangan agrobisnis dengan prioritas pengembangan sector pertanian dan perikanan. (g) Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Energi dan bahan galian lainnya. (h) Meningkatkan pemantauan/pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.

**Prioritas 14 : Perluasan Jaringan Social, Ekonomi secara Nasional dan Internasional.**

Prioritas Perluasan jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional akan diarahkan pada (a) Mengembangkan kerja sama tripartit (pemerintah daerah, pengusaha dan pekerja) (b) Meningkatkan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, (c) meningkatkan keaktifan daerah dalam kegiatan regional, nasional dan internasional.



**TABEL 7.10**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
1	Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan berbasis pariwisata dan produk lokal	1 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing.	1 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial 4 Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan 5 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6 Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7 Pembinaan dunia usaha, khususnya jasa konstruksi 8 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 9 Peningkatan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan Menengah 10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 11 Pengembangan industri agro
2	Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang berwawasan lingkungan	2 Pengembangan infrastruktur secara adil dan merata	1 Peningkatan Kesempatan Kerja 2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 4 Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan 5 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6 Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong 8 Pengadaan Peralatan dan Suku Cadang 9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial 11 Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 12 Pengembangan Perumahan

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				<p>13 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</p> <p>14 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>15 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</p> <p>16 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan</p> <p>17 Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan</p> <p>18 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>19 Pengendalian Pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>20 Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA</p> <p>21 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah</p> <p>22 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>23 Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>24 Perencanaan Tata Ruang</p> <p>25 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan</p> <p>26 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>27 Tanggap darurat jalan dan Jembatan</p> <p>28 Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam</p> <p>29 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran</p> <p>30 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</p> <p>31 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</p> <p>32 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>33 Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>34 Peningkatan dan Pengembangan tanaman Perkebunan</p> <p>35 Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>36 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>37 Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>38 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p>

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				39 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan 40 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 41 Pengembangan budidaya perikanan 42 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 43 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 44 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
3	Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter	Peningkatan Pemahaman dan pengamalan Nilai Agama serta aplikasi pendidikan berkarakter	3 Peningkatan kualitas kesalehan social melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti	1 Pembinaan Agama dan Adat
			4 Menjalin kehidupan social yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.	
			5 Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.	1 Peningkatan Mutu Pendidikan SDN/MI/SDLB 2 Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa 3 Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan Menengah 6 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 8 Pendidikan Non Formal 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah 10 Pendidikan Luar Biasa 11 Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 12 Pendidikan Berkarakter
4	Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	Peningkatan Kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat	6 Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.	1 Pendidikan Politik Masyarakat 2 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				4 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 6 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 9 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa 10 Kerjasama informasi dengan Mass Media
			7 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 4 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya 6 Pengembangan Lingkungan Sehat 7 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 8 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 9 Pembinaan Anak Terlantar 10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 11 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Perbaikan Gizi Masyarakat 13 Pengembangan Lingkungan Sehat 14 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 15 Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak 16 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 17 Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia 18 Peningkatan Kualitas Air

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				19 Lingkungan sehat Perumahan 20 Keluarga Berencana 21 Kesehatan Reproduksi Remaja 22 Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri 23 Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
			8 Lanjutan sapu bersih Kemiskinan.	1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			9 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan Gender.	1 Perencanaan Sosial dan Budaya 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3 Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam pembangunan 4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
			10 Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan.	1 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2 Peningkatan Peran serta Kepemudaan
5	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien	Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan	11 Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani.	1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan 3 Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan 5 Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6 Operasional Kecamatan 7 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				9 Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan 10 Pengembangan Data/Informasi 11 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 12 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Pembinaan dan Pengembangan aparatur 15 Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah 16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penataan Administrasi Kependudukan 18 Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan 19 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 20 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 21 Peningkatan Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah 22 Pengembangan Destinasi Wisata
6	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah	Pengembangan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Wisata Rekreasi	12 Pengembangan sector kepariwisataan	1 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan 2 Pengembangan Nilai Budaya 3 Pengelolaan Keragaman Budaya 4 Pengembangan Pemasaraan Pariwisata 5 Pengelolaan Kekayaan Budaya 6 Pengelolaan Permuseuman 7 Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya 8 Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya
7	Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional	Menjalin Kerjasama dan jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional.	13 Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah.	1 Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2 Kerjasama Pembangunan
			14 Memperluas jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional.	1 Peningkatan Pelayanan Angkutan 2 Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
				5 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6 Pengelolaan Penerangan Jalan umum 7 Pembinaan dan Pelayanan Perizinan 8 Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi 9 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah